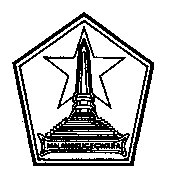
**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

| **Langkah 1** | **Langkah 2** | **Langkah 3** | **Langkah 4** | **Langkah 5** | **Langkah 6** | **Langkah 7** | **Langkah 8** | **Langkah 9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan** | **Data Pembuka Wawasan** | **Isu Gender** | | | **Kebijakan dan Rencana Kedepan** | | **Pengukuran Hasil** | |
| **Faktor Kesenjangan**  **(APKM)** | **Sebab Kesenjangan Internal** | **Sebab Kesenjangan Eksternal** | **Reformulasi Tujuan** | **Rencana Aksi** | **Basis Data (Base-line)** | **Indikator Kinerja** |
| **Program** :  Pengelolaan Keuangan Daerah  **Kegiatan** :  Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah  **Sub Kegiatan**:   * Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD * Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota * Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran * Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Kabupaten/Kota   **Tujuan** :   1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan SKPD 2. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman perencanaan anggaran program dan kegiatan SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan   (Sumber data : RKA BKAD 2025) | * 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah   2. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah   3. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah   4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah   5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisas iPemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah   6. Peraturan Daerah Kota Malamg Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah   7. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan   8. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2020 tentang StandarTeknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas   9. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan .atau Alat Berat   10. Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran   11. Peratura Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hubah   12. Peratura Walikota Malang Nomoir 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial   13. Peraturan Walikota Malang Nomoir 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga   14. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kertu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah   15. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah   16. Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan   17. Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2022 tenatng Standar Harga Satuan   18. Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang : 28   19. Jumlah perencana program SKPD 26 orang terdiri dari: P=20 orang L=6 orang   20. Jumlah Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendshsrs Pengeluaran Pembantu sebanyak 181 orang terdiri dari: P=105 orang L=76 orang | * Seiring perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, menuntut kapasitas sumberdaya aparatur yang memadai * Dalam beberapa pengalaman dan kondisi di lapangan masih terdapat sumber daya manusia yang kurang teliti dan belum memahami adanya perubahan regulasi * Terbitnya Permendagri Nomor 90/2019 menuntut penyusun program SKPD memahami mekanisme penyusunan perencanaan pembanguinan dan keuangan daerah yang ter-aplikasikan melalui SIPD sesuai program kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan. * Adanya pengembangan aplikasi SIPD (biru) yang bangun Bina Keuda ke SIPD RI (merah) yang dibangun oleh Pusdatin RI * Terbitnya Peraturan Walikota terlkait regulasi penganggaran * Terbitnya Peraturan Walikota Malang tentang Perubahan Standar Harga Satuan sebagai dasar penyusunan RKA/DPA * Terbitnya Peraturan Walikota Malang tentang Siatem dan Prosedur pengelolaan keuangan daerah menyesuaikan Permendagri Nomor 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah | * Perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan yg dinamis terkadang tidak diikuti sosialisasi yang intens * Kemampuan aparatur menguasai IT yang belum optimal * Aparatur kurang mengikuti perkembangan/ perubahan regulasi (kurang up date) | * Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah * Implementasi SIPD RI yang dibangun dan dikelola oleh PUSDATIN RI * Ditetapkannya SIPD sebagai Aplikasi Umum Pemerintah Daerah | * Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah * Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran program dan kegiatan SKPD * Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan | * Melaksanankan bimbingan teknis perencanaan anggaran secara fullboard, dengan tenaga ahli/narasumber yang berkompeten namun demikian Penyusun Program /Bendahara Penerimaan/Bendahara /Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu Pengekuaran Perempuan tetap berperan aktif mengikuti kegiatan * Asistensi/ desk penyusunan RKA SKPD baik secara langsung melalui desk, zoom meeting dan verifikasi melalui aplikasi SIPD RI * Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pusdatin baik melalui help desk maupun secara langsung ke kantor Pusdatin, Kemendagri di Jakarta * TOT terkait monitoring dan evaluaisi pelaksanaan penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mengundang Dirjen Keuda dan Pusdatin sebagau narasumber di Jakarta melibatkan SKPD terkait * Melakukan monitoring anggaran reponsif gender, dengan cara menyiapkan/membuat daftar hadir kegiatan sesuai jenis kelamin/menambahkan kolom untuk jenis kelamin peserta | * Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang   - 28 SKPD  - 57 Kelurahan  - 17 BLUD/Pustu  - 29 SMPN | * Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan sebanyak 131 entitas di lingkungan Pemerintah Kota Malang * - 28 SKPD   - 57 Kelurahan  - 17 BLUD/Pustu  - 29 SMPN   * % kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan 100% |



**PEMERINTAH KOTA MALANG**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

JL. Simpang Majapahit No. 1 Telp. (0341)- 326 025, 366 955, 360 975, 328553, 343894

Fax. (0341) – 326 025, 328 553

M A L A N G Kode Pos 65119

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**

**(*GENDER BUDGET STATEMENT*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPD** | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| **Tahun** | Tahun Anggaran 2025 | |
| **Program** | Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| **Kegiatan** | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | |
| **Kode Program** | 5.02.02 | |
| **Analisa Situasi** | **1. Data Pembuka Wawasan**   1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah 3. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan 8. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2020 tentang StandarTeknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas 9. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan .atau Alat Berat 10. Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran 11. Peratura Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hubah 12. Peratura Walikota Malang Nomoir 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial 13. Peraturan Walikota Malang Nomoir 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga 14. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kertu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 15. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 16. Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan 17. Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2022 tenatng Standar Harga Satuan 18. Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang : 28 19. Jumlah perencana program SKPD 26 orang terdiri dari: P=20 orang L=6 orang 20. Jumlah Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebanyak 183 orang terdiri dari: P=124 orang L=59 orang   **2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender**  **a. Faktor Kesenjangan (Akses/Kontrol/Partisipasi/manfaat)**   * Seiring perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, menuntut kapasitas sumberdaya aparatur yang memadai * Dalam beberapa pengalaman dan kondisi di lapangan masih terdapat sumber daya manusia yang kurang teliti dan belum memahami adanya perubahan regulasi * Terbitnya Permendagri Nomor 90/2019 menuntut penyusun program SKPD memahami mekanisme penyusunan perencanaan pembanguinan dan keuangan daerah yang ter-aplikasikan melalui SIPD sesuai program kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan. * Adanya pengembangan aplikasi SIPD (biru) yang bangun Bina Keuda ke SIPD RI (merah) yang dibangun oleh Pusdatin RI * Terbitnya Peraturan Walikota terlkait regulasi penganggaran * Terbitnya Peraturan Walikota Malang tentang Perubahan Standar Harga Satuan sebagai dasar penyusunan RKA/DPA * Terbitnya Peraturan Walikota Malang tentang Siatem dan Prosedur pengelolaan keuangan daerah menyesuaikan Permendagri Nomor 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  1. **Penyebab Internal** 2. Perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan yg dinamis terkadang tidak diikuti sosialisasi yang intens 3. Kemampuan aparatur menguasai IT yang belum optimal 4. Aparatur kurang mengikuti perkembangan/ perubahan regulasi (kurang up date)   **c. Penyebab Eksternal**   1. Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah 2. Implementasi SIPD RI yang dibangun dan dikelola oleh PUSDATIN RI 3. Ditetapkannya SIPD sebagai Aplikasi Umum Pemerintah Daerah | |
| **Capaian Program** | **Tujuan Program yang telah Diformulasikan** | |
|  | 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah 2. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran program dan kegiatan SKPD 3. Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan | |
|  | **Indikator dan Target Kinerja** | |
|  | **Output:**   * Dokumen RKA/DPA SKPD tahun anggaran 2025 * Perencana Program SKPD yang terfasilitasi ; Jumlah entitas SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebanyak 131 terdiri:   - 28 SKPD  - 57 Kelurahan  - 17 BLUD/Pustu  - 29 SMPN  **Outcome:**  Perencanaan anggaran program dan kegiatan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |
| **Jumlah Anggaran Kegiatan** | Rp 986.193.100,- | |
| **Rencana Aksi** | **Sub Kegiatan 1** | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD |
| Masukan/Input | Rp. 261.910.000,- |
| Keluaran | * Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang terfasiltasi penyusunan RKA/DPA Tahun 2025 sebanyak 131 entitas tediri:   28 SKPD,- 57 Kelurahan,- 17 BLUD/Pustu dan - 29 SMPN |
| Hasil | % kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan 100% |
| **Sub Kegiatan 2** | Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |
| Masukan/Input | Rp. 110.450.000,- |
| Keluaran | * Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang peserta Bimtek Penganggaran sebanyak 131 entitas tediri:   28 SKPD,- 57 Kelurahan,- 17 BLUD/Pustu dan - 29 SMPN |
| Hasil | % kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan 100% |
|  | **Sub Kegiatan 3** | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran |
| Masukan/Input | Rp. 257.580.000,- |
| Keluaran | Jumlah Rancangan Peraturan Walikota, Dokumen Kajian dan Study Kelayakan |
| Hasil | % kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan 100% |
|  | **Sub Kegiatan 4** | Pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |
| Masukan/Input | Rp 220.396.000,- |
| Keluaran | Jumlah SKPD yang mengimplementasikan SIPD RI sebanyak 131 entitas terdiri:  28 SKPD,- 57 Kelurahan,- 17 BLUD/Pustu dan - 29 SMPN |
| Hasil | % kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan 100% |

|  |  |
| --- | --- |
| Keterangan :  Tanggal pembahasan :  Catatan hasil pembahasan: | Malang, Agustus 2025  KEPALA BADAN KEUANGAN  DAN ASET DAERAH,  **Drs. SUBKHAN, M.A.P**  Pembina Utama Muda  NIP. 19680408 198809 1 001 |

1.

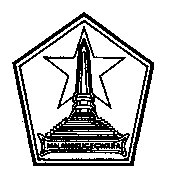
2.

3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tim Anggaran Pemerintah Daerah :** | | | | |
| **NO** | **NAMA** | **NIP** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

| **Langkah 1** | **Langkah 2** | **Langkah 3** | **Langkah 4** | **Langkah 5** | **Langkah 6** | **Langkah 7** | **Langkah 8** | **Langkah 9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan** | **Data Pembuka Wawasan** | **Isu Gender** | | | **Kebijakan dan Rencana Kedepan** | | **Pengukuran Hasil** | |
| **Faktor Kesenjangan**  **(APKM)** | **Sebab Kesenjangan Internal** | **Sebab Kesenjangan Eksternal** | **Reformulasi Tujuan** | **Rencana Aksi** | **Basis Data (Base-line)** | **Indikator Kinerja** |
| **Program** :  Pengelolaan Keuangan Daerah  **Kegiatan** :  Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah  **Sub Kegiatan** :   * Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah * Koordinasim Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank * Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota   **Tujuan** :   1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan SKPD 2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur pengelola keuangan daerah agar Pengelolaan Keuangan Daerah bisa Transparan, Profesional dan Akuntabel   (Sumber data :RKA BKAD 2025) | * 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah   2. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah   3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah   4. Peraturan Daerah Kota Malamg Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah   5. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan   6. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2020 tentang StandarTeknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas   7. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan .atau Alat Berat   8. Peratura Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hubah   9. Peratura Walikota Malang Nomoir 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial   10. Peraturan Walikota Malang Nomoir 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga   11. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kertu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah   12. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah   13. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Malang dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Nomor: 900/ /35.73.503/2024 dan Nomor: 062/ /MLG/OPS.DN/PKS tentang Penggunaan KKPD   14. SK Walikota Malang Nomor 188.45/ /35.73.112/2024 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2025   15. SK Walikota Malang Nomor 188,45/ /35.73.112/2024 tentang Penetapan Pemegang dan Administrator KKPD di Lingkjungan Pemerintah Kota Malang   16. Jumlah entitas SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebanyak 131 terdiriL   - 28 SKPD  - 57 Kelurahan  - 17 BLUD/Pustu  - 29 SMPN   * 1. Jumlah PPKeu SKPD 28 orang terdiri dari: P=26 orang, L=2 orang   2. Jumlah Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendshsrs Pengeluaran Pembantu sebanyak 183 orang terdiri dari: P=124 orang L=59 orang | * Seiring perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, menuntut kapasitas sumberdaya manusia yang memadai * Implementasi SIPD penatausahaan dan akuntansii pelaporan ; aplikasi SIPD (*biru) yang bangun Bina Keuda ke SIPD RI (merah) yang dibangun oleh* Pusdatin RI, belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan * Diotetapkannya SIPD sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah * Implementasi Peraturan Walikota Malang tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kertu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD belum maksimal, meskipun telah dilakukan sosialisasi, desk, monitoring dan evaluasi, dikarenakan membutuhkan formulasi yang tepat untuk tindak lanjut pelaksanaan dengan bank penyelenggara secara teknisnya * Belum tersedianya data/informasi merchant penyedia EDC CC BNI oleh Bank BNI dan/atau Bank HIMBARA lainnyapenyelenggara KKPD * Dalam beberapa pengalaman dan kondisi di lapangan perempuan lebih rajin dan teliti mengerjakan administrasi dan penatausahaan * Namun dalam mengaplikasikan sistem aplikasi berbasis IT, laki-laki lebih cepat dan mampu berkembang | * Masih banyaknya Pengelola Keuangan SKPD ( PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluran/Penerimaan; Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu) yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akutansi * SIPD belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan * Aparatur kurang mengikuti perkembangan/ perubahan regulasi (kurang up date) * Masih kurangnya pemahaman Bendahara SKPD untuk mengimplementasikan kebijakan KKPD, karena minimnya informasi merchant/penyedia EDC CC BNI oleh Bank BNI dan/atau Bank HIMBARA lainnyapenyelenggara KKPD | * Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah * Diotetapkannya SIPD sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah * SIPD belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan * Masih minimnya informasi merchant/penyedia EDC CC BNI oleh Bank BNI dan/atau Bank HIMBARA lainnyapenyelenggara KKPD * Belum adanya sosialisasi terkait kebijakan KKPD bagi merchant/penyedia barang/jasa oleh pihak Bank penyelenggara KKPD | * Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah * Meningkatkan pelayanan [perbendaharaan daerah sesuai ketentuan | * Melakukan pembinaan dan sosialisasi, bimtek dan desk penerapan SIPD dalam rangka penatausahaan keuangan daerah diikuti masing-masing PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Malang * Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pada siang hari dan/atau jam kerja, sehingga Pejabat Perempuan dapat berperan aktif. * Kegiatan sosialisasi terkait kebijakan KKPD bagi merchant/penyedia barang/jasa oleh pihak Bank penyelenggara KKPD * Melakukan monitoring reponsif gender, dengan cara menyiapkan/membuat daftar hadir kegiatan sesuai jenis kelamin/menambahkan kolom untuk jenis kelamin peserta * Menyusun regulasi tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah | Jumlah Pengelola Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dari 138 entitas terdiri:   1. PPK SKPD sebanyak 28 orang, terdiri : P = 26 org, L = 2 org 2. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu terdiri :   181 orang terdiri: P=105 L=76 | * Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan sebanyak 131 entitas terdiri dari:   + 28 SKPD   + 57 Kelurahan   + 17 BLUD/Pustu   + 29 SMPN * % kesesuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku 100% |

** PEMERINTAH KOTA MALANG**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

JL. Simpang Majapahit No. 1 Telp. (0341)- 326 025, 366 955, 360 975, 328553, 343894

Fax. (0341) – 326 025, 328 553

M A L A N G Kode Pos 65119

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (*GENDER BUDGET STATEMENT*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPD** | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| **Tahun** | Tahun Anggaran 2025 | |
| **Program** | Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| **Kegiatan** | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | |
| **Kode Program** | 5.02.02.2.02 | |
| **Analisa Situasi** | **1. Data Pembuka Wawasan**   * 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah   2. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah   3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah   4. Peraturan Daerah Kota Malamg Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah   5. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan   6. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2020 tentang StandarTeknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas   7. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan .atau Alat Berat   8. Peratura Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hubah   9. Peratura Walikota Malang Nomoir 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial   10. Peraturan Walikota Malang Nomoir 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga   11. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kertu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah   12. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah   13. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Malang dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Nomor: 900/ /35.73.503/2024 dan Nomor: 062/ /MLG/OPS.DN/PKS tentang Penggunaan KKPD   14. SK Walikota Malang Nomor 188.45/ /35.73.112/2024 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2025   15. SK Walikota Malang Nomor 188,45/ /35.73.112/2024 tentang Penetapan Pemegang dan Administrator KKPD di Lingkjungan Pemerintah Kota Malang   16. Jumlah entitas SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebanyak 131 terdiriL * 28 SKPD * 57 Kelurahan * 17 BLUD/Pustu * 29 SMPN   1. Jumlah PPKeu SKPD 28 orang terdiri dari: P=26 orang, L=2 orang   2. Jumlah Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendshsrs Pengeluaran Pembantu sebanyak 183 orang terdiri dari: P=124 orang L=59 orang   **2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender**  **a. Faktor Kesenjangan (Akses/Kontrol/Partisipasi/manfaat)**   1. Seiring perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, menuntut kapasitas sumberdaya manusia yang memadai 2. Implementasi SIPD penatausahaan dan akuntansii pelaporan ; aplikasi SIPD (biru) yang bangun Bina Keuda ke SIPD RI (merah) yang dibangun oleh Pusdatin RI, belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan 3. Diotetapkannya SIPD sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah 4. Implementasi Peraturan Walikota Malang tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kertu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD belum maksimal, meskipun telah dilakukan sosialisasi, desk, monitoring dan evaluasi, dikarenakan membutuhkan formulasi yang tepat untuk tindak lanjut pelaksanaan dengan bank penyelenggara secara teknisnya 5. Belum tersedianya data/informasi merchant penyedia EDC CC BNI oleh Bank BNI dan/atau Bank HIMBARA lainnyapenyelenggara KKPD 6. Dalam beberapa pengalaman dan kondisi di lapangan perempuan lebih rajin dan teliti mengerjakan administrasi dan penatausahaan 7. Namun dalam mengaplikasikan sistem aplikasi berbasis IT, laki-laki lebih cepat dan mampu berkembang   **b. Penyebab Internal**   1. Masih banyaknya Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluran/Penerimaan; Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu) yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akutansi 2. SIPD belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan 3. Aparatur kurang mengikuti perkembangan/ perubahan regulasi (kurang up date) 4. Masih kurangnya pemahaman Bendahara SKPD untuk mengimplementasikan kebijakan KKPD, karena minimnya informasi merchant/penyedia EDC CC BNI oleh Bank BNI dan/atau Bank HIMBARA lainnyapenyelenggara KKPD   **c. Penyebab Eksternal**   1. Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah 2. Diotetapkannya SIPD sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah 3. SIPD belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan 4. Masih minimnya informasi merchant/penyedia EDC CC BNI oleh Bank BNI dan/atau Bank HIMBARA lainnyapenyelenggara KKPD 5. Belum adanya sosialisasi terkait kebijakan KKPD bagi merchant/penyedia barang/jasa oleh pihak Bank penyelenggara KKPD | |
| **Capaian Program** | **Tujuan Program yang telah Diformulasikan** | |
|  | 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah 2. Meningkatkan pelayanan [perbendaharaan daerah sesuai ketentuan | |
|  | **Indikator dan Target Kinerja** | |
|  | **Output:**  Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan sebanyak 131 entitas terdiri dari:  - 28 SKPD, 57 Kelurahan,- 17 BLUD/Pustu dan - 29 SMPN  **Outcome:**   * Pengelolaan keuangan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. * Penatausahaan Keuangan Daerah yang tertib dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | |
| **Jumlah Anggaran Kegiatan** | Rp 308.535.000,- | |
| **Rencana Aksi** | **Sub Kegiatan 1** | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah |
|  | Masukan/Input | Rp 60.944.500,- |
| Keluaran | SP2D terbit kurang dari 2 (dua) hari |
| Hasil | % pelayanan perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan |
| **Sub Kegiatan 2** | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lermbaga Keuangan Bukan Bank |
| Masukan/Input | Rp 69.549.750,- |
| Keluaran | Koordinasi, supervise, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Transaksi Non Tunai |
| Hasil | % pelayanan perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan |
| **Sub Kegiatan 3** | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota |
| Masukan/Input | Rp. 107.628.000,- |
| Keluaran | Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan sebanyak =183 entitas |
| Hasil | % pelayanan perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan |

|  |  |
| --- | --- |
| Keterangan :  Tanggal pembahasan :  Catatan hasil pembahasan: | Malang, Agustus 2025  KEPALA BADAN KEUANGAN  DAN ASET DAERAH,  **Drs. SUBKHAN, M.A.P**  Pembina Utama Muda  NIP. 19680408 198809 1 001 |

1.

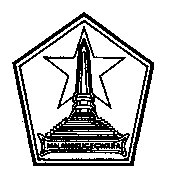
2.

3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tim Anggaran Pemerintah Daerah :** | | | | |
| **NO** | **NAMA** | **NIP** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

| **Langkah 1** | **Langkah 2** | **Langkah 3** | **Langkah 4** | **Langkah 5** | **Langkah 6** | **Langkah 7** | **Langkah 8** | **Langkah 9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan** | **Data Pembuka Wawasan** | **Isu Gender** | | | **Kebijakan dan Rencana Kedepan** | | **Pengukuran Hasil** | |
| **Faktor Kesenjangan**  **(APKM)** | **Sebab Kesenjangan Internal** | **Sebab Kesenjangan Eksternal** | **Reformulasi Tujuan** | **Rencana Aksi** | **Basis Data (Base-line)** | **Indikator Kinerja** |
| **Program** :  Pengelolaan Keuangan Daerah  **Kegiatan** :  Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah  **Sub Kegiatan** :   * Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah * Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah * Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota   **Tujuan** :  Laporan Keuangan SKPD disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual mendukung opini BPK WTP  (Sumber data : RKA BKAD 2025s) | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan 3. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 4. Permendagri No 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 5. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah 6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 9. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi 10. Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/564/35.73/12/2014 tentang Penetapan Konversi Kode Rekening Penyusunan Anggaran sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ke kode rekening Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 11. Jumlah Pengelola Keuangan dan asset SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dari 131 entitas terdiri: 12. PPKeu SKPD sebanyak 28 orang, terdiri : P = 26 org, L = 2 org 13. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu sebanyak = 183 orang terdiri :   P = 124 orang  L = 59 orang   1. Jumlah Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu sebanyak= 112 orang, terdiri :   P = 44 org  L = 68 org   1. L/K SKPD sebagai bahan penyusunan L/K Pemerintah Daerah 2. Kriteria Opini WTP oleh BPK RI al :    * Kesesuaian dengan SAP Berbasis Akrual    * Kecukupan pengungkapan dalam L/K    * Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan    * Efektifitas Sistem Pengendalian Intern terhadap keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset | * Seiring perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, menuntut kapasitas sumberdaya manusia yang memadai * Implementasi SIPD Ri yang dikembangkan oleh Pusdatin * Diotetapkannya SIPD sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah * SIPD RI penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan * Belum tersusunnya Sistem dan Prosedur Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah * Dalam beberapa pengalaman dan kondisi di lapangan perempuan lebih rajin dan teliti mengerjakan administrasi dan penatausahaan * Namun dalam mengaplikasikan sistem aplikasi berbasis IT, laki-laki lebih cepat dan mampu berkembang | * Masih banyaknya PPK-SKPD yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akutansi * SIPD RI penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan belum dilengkapi dengan fitur/modul belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan, sehingga PPKeu sering mengalami kesulitan/kekeliruan dalam mengimplementasikan * Belum tersusunnya Sistem dan Prosedur Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | * Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah * Implementasi SIPD RI penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan * Diotetapkannya SIPD sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah * SIPD RI penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan | 1. L/K Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mendukung pencapaian opini BPK 2. Kriteria Opini WTP oleh BPK RI al :    * Kesesuaian dengan SAP Berbasis Akrual    * Kecukupan pengungkapan dalam L/K    * Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 3. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern terhadap keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset | 1. Melakukan pembinaan dan asistensi penyusunan L/K SKPD, untuk masing-masing SKPD yang diikuti oleh PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang 2. Menyusun Rancangan Peraturan Walikota Tentang Sistem dan Prosedur Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 3. Melaksanakan pembinaan dan asistensi pada siang hari dan/atau jam kerja, sehingga Pejabat Perempuan dapat berperan aktif. 4. Melakukan monitoring reponsif gender, dengan cara menyiapkan/membuat daftar hadir kegiatan sesuai jenis kelamin/menambahkan kolom untuk jenis kelamin peserta | * Jumlah Pengelola Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang 131 entitas terdiri:  1. PPK SKPD sebanyak 28 orang, terdiri : P = 26 org, L = 2 org 2. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu terdir sebanyak 181 orang i :   P =105 orang  L = 76 orang   1. Jumlah Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu sebanyak= 136 orang, terdiri :   P = 52 org  L = 84 org   * Capaian target kinerja sasaran SKPD adalah Opini BPK atas L/K Pemerintah Daerah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian | % L/K SKPD Yang Berkualitas mendukung Opini BPK WTP |

 **PEMERINTAH KOTA MALANG**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

JL. Simpang Majapahit No. 1 Telp. (0341)- 326 025, 366 955, 360 975, 328553, 343894

Fax. (0341) – 326 025, 328 553

M A L A N G Kode Pos 65119

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (*GENDER BUDGET STATEMENT*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPD** | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| **Tahun** | Tahun Anggaran 2025 | |
| **Program** | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| **Kegiatan** | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | |
| **Kode Program** | 5.02.02.2.03 | |
| **Analisa Situasi** | **1. Data Pembuka Wawasan**   1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan 3. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 4. Permendagri No 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 5. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah 6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 9. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi 10. Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/564/35.73/12/2014 tentang Penetapan Konversi Kode Rekening Penyusunan Anggaran sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ke kode rekening Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 11. Jumlah Pengelola Keuangan dan asset SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dari 131 entitas terdiri:     * 1. PPKeu SKPD sebanyak 28 orang, terdiri : P = 26 org, L = 2 org 12. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu sebanyak = 183 orang terdiri :   P = 105 orang  L = 76 orang   1. Jumlah Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu sebanyak= 112 orang, terdiri :   P = 44 org  L = 68 org   1. L/K SKPD sebagai bahan penyusunan L/K Pemerintah Daerah 2. Kriteria Opini WTP oleh BPK RI al :  * Kesesuaian dengan SAP Berbasis Akrual * Kecukupan pengungkapan dalam L/K * Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan * Efektifitas Sistem Pengendalian Intern terhadap keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset   **2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender**  **a. Faktor Kesenjangan (Akses/Kontrol/Partisipasi/manfaat)**   1. Seiring perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, menuntut kapasitas sumberdaya manusia yang memadai 2. Implementasi SIPD Ri yang dikembangkan oleh Pusdatin 3. Diotetapkannya SIPD sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah 4. SIPD RI penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan 5. Belum tersusunnya Sistem dan Prosedur Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 6. Dalam beberapa pengalaman dan kondisi di lapangan perempuan lebih rajin dan teliti mengerjakan administrasi dan penatausahaan 7. Namun dalam mengaplikasikan sistem aplikasi berbasis IT, laki-laki lebih cepat dan mampu berkembang   **b. Penyebab Internal**   1. Masih banyaknya PPK-SKPD yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akutansi 2. SIPD RI penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan belum dilengkapi dengan fitur/modul belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan, sehingga PPKeu sering mengalami kesulitan/kekeliruan dalam mengimplementasikan 3. Belum tersusunnya Sistem dan Prosedur Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah   **c. Penyebab Eksternal**   1. Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah 2. Implementasi SIPD RI penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan 3. Diotetapkannya SIPD sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah 4. SIPD RI penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan | |
| **Capaian Program** | **Tujuan Program yang telah Diformulasikan** | |
|  | 1. Opini BPK WTP dengan memenuhi kriteria:  * Kesesuaian dengan SAP Berbasis Akrual * Kecukupan pengungkapan dalam L/K * Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan * Efektifitas Sistem Pengendalian Intern terhadap keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset | |
|  | **Indikator dan Target Kinerja**  L/K SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mendukung pencapaian opini BPK | |
|  | **Output:**  Jumlah entitas yang mendapatkan asistensi/pendampingan sejumlah 131 entitas  **Outcome:**   * % L/K SKPD Yang Berkualitas mendukung Opini BPK WTP 100% | |
| **Jumlah Anggaran Kegiatan** | Rp 650.705.500,- | |
| **Rencana Aksi** | **Sub Kegiatan 1** | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah |
| Masukan/Input | Rp 462.971.000,- |
| Keluaran | Jumlah entitas yang mendapatkan asistensi/pendampingan sejumlah :   1. PPK SKPD sebanyak 28 orang, terdiri : P = 26 org, L = 2 org 2. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu sebanyak 183 orang terdiri :   P =124 orang  L = 59 orang |
| Hasil | % L/K SKPD Yang Berkualitas mendukung Opini BPK WTP 100% |
| **Sub Kegiatan 2** | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan |
| Masukan/Input | Rp 19.120.000,- |
| Keluaran | Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daeeah  Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah |
| Hasil | % L/K SKPD Yang Berkualitas mendukung Opini BPK WTP 100% |
| **Sub Kegiatan 3** | Pembinaan Akuntansi, Pelapioran dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Koya |
| Masukan/Input | Rp 113.720.000,- |
| Keluaran | Jumlah entitas yang mendapatkan asistensi sejumlah :   * :PPK SKPD sebanyak 28 orang, terdiri :   P = 26 org,  L = 2 org   * Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu sebanyak 183 orang terdiri :   P =124 orang  L = 59 orang |
| Hasil | % L/K SKPD Yang Berkualitas mendukung Opini BPK WTP 100% |

|  |  |
| --- | --- |
| Keterangan :  Tanggal pembahasan :  Catatan hasil pembahasan::. | Malang, Agustus 2025  KEPALA BADAN KEUANGAN  DAN ASET DAERAH,  **Drs. SUBKHAN, M.A.P**  Pembina Utama Muda  NIP. 19680408 198809 1 001 |

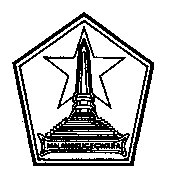
1..

2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tim Anggaran Pemerintah Daerah :** | | | | |
| **NO** | **NAMA** | **NIP** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

| **Langkah 1** | **Langkah 2** | **Langkah 3** | **Langkah 4** | **Langkah 5** | **Langkah 6** | **Langkah 7** | **Langkah 8** | **Langkah 9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan** | **Data Pembuka Wawasan** | **Isu Gender** | | | **Kebijakan dan Rencana Kedepan** | | **Pengukuran Hasil** | |
| **Faktor Kesenjangan**  **(APKM)** | **Sebab Kesenjangan Internal** | **Sebab Kesenjangan Eksternal** | **Reformulasi Tujuan** | **Rencana Aksi** | **Basis Data (Base-line)** | **Indikator Kinerja** |
| **Program** :  Pengelolaan Barang Milik Daerah  **Kegiatan** :  Pengelolaan Barang Milik Daerah  **Sub Kegiatan** :   * Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota * Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah * Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah * Penilaian Barang Milik Daerah * Pengamanan Barang Milik Daerah * Pengawasan dan Pengendalian Pwngelolaan Barang Milik Daeeah * Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah * Penatausahaan Barang Milik Daerah * Inventarisasi Barang Milik Daerah * Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusasn BMD   Tujuan:  % Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD  0.0136%  (Sumber data : RKA BKAD 2025) | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Permendagri No 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 4. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah 6. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha 8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 9. Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah 10. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik 11. Peraturan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 12. Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 13. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah 14. Jumlah Pengelola BMD SKPD:dari 131 entitas terdiri:  * Pejabat Penatausahaan BMD SKPD dalam hal ini melekat kepada Kepala Sub Umum, Sekretariat SKPD sebanyak 28 orang   P = 13 orang  L = 15 orang   * Pengurus Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malangdari sebanyak= 112 orang, terdiri : P = 44 org, L = 68 org  1. Laporan Barang Milik Daerah SKPD sebagai bahan penyusunan L/K Pemerintah Daerah 2. Kontribusi Pemanfaatan BMD terhadap PAD Kota Malang = 0,0136 3. Kriteria Opini WTP oleh BPK al:  * Kesesuaian dengan SAP Berbasis Akrual * Kecukupan pengungkapan dalam L/K * Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan * Efektifitas Sistem Pengendalian Intern terhadap keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset | * Seiring perubahan regulasi terkait pengelolaan aset daerah, menuntut kapasitas sumberdaya manusia yang memadai * Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah * Implementasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaan asset daerah melalui e- BMD melalui Kerjasama/MoU dengan UI Jakarta menuntut pemahaman/pengembangan pengetahuan bagi pengelola BMd di SKPD * TOT penatausahaan BMD melalui e-BMD * Belum sepenuhnya Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD memahami perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan Barang Milik daerah * Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) belum sepenuhnya pemdukung penyusunan LBMD * Belum terbangunnya SIN ( Single Identification Number)/ Data Tunggal BMD * Belum terdapatnya regulasi dan pedoman teknis penysunan RKBMD sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 * Terbatasnya jumlah SDM pengelola BMD SKPD * Peningkatan PAD dari pemanfaatan Barang Milik Daerah * Pengenaan sewa Barang Milik Daerah yang semula dengan pengenaan retribusi pemakaian kekayaan daerah * Adanya tanah aset daerah yang belum didukung dengan dokumen legal formal yang sah * Proses sertifikasi atas tanah aset daerah mengalami kendala disebabkan belum tersedianya data/alas hak karena terbatasnya data pendung.bukti kepemilikan yang sah atas tanah aset daerah * Pemanfaatan Tanah Aset Daerah sesuai peruntukan dan pemanfaatannya | * Belum sepenuhnya Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD memahami perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah * Jabatan Pengurus Barang dianggap sebagai penggugur kewajiban dan pelengkap saja dalam pelaksanaan pengelolaan BMD * Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) belum sepenuhnya pemdukung penyusunan LBMD * Belum terbangunnya SIN ( Single Identification Number)/ Data Tunggal BMD * Terbatasnya jumlah SDM pengelola BMD SKPD * Adanya tanah aset daerah yang belum didukung dengan dokumen legal formal yang sah * Proses sertifikasi atas tanah aset daerah mengalami kendala disebabkan belum tersedianya data/alas hak karena terbatasnya data pendung.bukti kepemilikan yang sah atas tanah aset daerah * Penerapan penatausahaan BMD melalui e-BMD menuntut Pengelola BMD SKPD mengembangkan kapasitas dan pengetahuannya | * Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan aset daerah tidak dibarengi dengan aturan teknis petunjuk pelaksanaannya * Penerapan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaan asset daerah melalui e- BMD * Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum tersosialisasikan kepada Pengeloma BMD SKPD * Penerapan penatausahaan BMD melalui e-BMD menuntut Pengelola BMD SKPD mengembangkan kapasitas dan pengetahuannya * Penerbitan Ijin Pemakaian Tanah Aset Daerah yang dimohon sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya | * Penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan * Laporan BMD sebagai bagian L/K Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mendukung pencapaian opini BPK * Kontribusi Pemanfaatan BMD terhadap PAD * Peningkatan Status Hukum Tanah Aset Daerah melalui sertoifikasi * Ijin Pemakaian Tanah Aset Daerah sesuai peruntukan dan pemanfaatannya | 1. Melakukan pembinaan dan asistensi/pendampingan penyusunan Laporan BMD SKPD, untuk masing-masing SKPD yang diikuti oleh Pejabat Penatausahaan BMD SKPD dan Pengurus Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebanyak 131 entitas entitas 2. Rekonsiliasi dan konsolidasi LBMD SKPD 3. Sosialisasi Permendagri No 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Aset Daerah dan pembekalan penerapannya melalui aplikasi e -BMD 4. Sinkronisasi dan konsolidasi pencatatan data Barang Milik Daeran berupa tanah, Gedung/Bangunan 5. Cek Lokasi atas permohonan Ijin Pemakaian BMD sesuai peruntukan dan pemanfaatannya 6. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pada siang hari dan/atau jam kerja, sehingga Pejabat Perempuan dapat berperan aktif 7. Melakukan monitoring reponsif gender, dengan cara menyiapkan/membuat daftar hadir kegiatan sesuai jenis kelamin/menambahkan kolom untuk jenis kelamin peserta | 1. Jumlah Pengurus Barang Pengguna Pengurus Barang Pembantu Pemerintah Kota Malang sebanyak 131 entitas = 136 orang, terdiri   P= 52 orang  L = 84 orang   1. Jumlah Pejabat Penataisahaan BMD SKPD sebanyak 131 enritas tsebanyak 136 orang terdiri:   P = 13 org  L = 15 org   * Rekonsiliasi dan konsolidasi LBMD SKPD * Sinkronisasi dan konsolidasi pencatatan data Barang Milik Daeran berupa tanah, Gedung/bangunan * Capaian target kinerja sasaran SKPD adalah Opini BPK atas L/K Pemerintah Daerah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian | * Kontrinbusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar * % Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan * % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukanmya |

****

**PEMERINTAH KOTA MALANG**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

JL. Tugu No. 1 Telp. (0341)- 326 025, 366 955, 360 975, 328553, 343894

Fax. (0341) – 326 025, 328 553

M A L A N G Kode Pos 65119

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**

**(*GENDER BUDGET STATEMENT*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPD** | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| **Tahun** | Tahun Anggaran 2025 | |
| **Program** | Pengelolaan Barang Milik Daerah | |
| **Kegiatan** | Pengelolaan Barang Milik Daerah | |
| **Kode Program** | 5.02.03.2.01 | |
| **Analisa Situasi** | **1. Data Pembuka Wawasan**   1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Permendagri No 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 4. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah 6. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha 8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 9. Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah 10. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik 11. Peraturan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 12. Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 13. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah 14. Jumlah Pengelola BMD SKPD:dari 131 entitas terdiri: 15. Pejabat Penatausahaan BMD SKPD dalam hal ini melekat kepada Kepala Sub Umum, Sekretariat SKPD sebanyak 28 orang, terdiri:   P = 13 orang  L = 15 orang   1. Pengurus Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malangdari sebanyak= 112 orang, terdiri : P = 44 org, L = 68 org 2. Laporan Barang Milik Daerah SKPD sebagai bahan penyusunan L/K Pemerintah Daerah 3. Kontribusi Pemanfaatan BMD terhadap PAD Kota Malang = 0,0136 4. Kriteria Opini WTP oleh BPK al:  * Kesesuaian dengan SAP Berbasis Akrual * Kecukupan pengungkapan dalam L/K * Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan * Efektifitas Sistem Pengendalian Intern terhadap keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset     **2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender**  **a. Faktor Kesenjangan (Akses/Kontrol/Partisipasi/manfaat)**   * Seiring perubahan regulasi terkait pengelolaan aset daerah, menuntut kapasitas sumberdaya manusia yang memadai * Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah * Implementasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaan asset daerah melalui e- BMD melalui Kerjasama/MoU dengan UI Jakarta menuntut pemahaman/pengembangan pengetahuan bagi pengelola BMd di SKPD * TOT penatausahaan BMD melalui e-BMD * Belum sepenuhnya Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD memahami perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan Barang Milik daerah * Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) belum sepenuhnya pemdukung penyusunan LBMD * Belum terbangunnya SIN ( Single Identification Number)/ Data Tunggal BMD * Belum terdapatnya regulasi dan pedoman teknis penysunan RKBMD sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 * Terbatasnya jumlah SDM pengelola BMD SKPD * Peningkatan PAD dari pemanfaatan Barang Milik Daerah * Pengenaan sewa Barang Milik Daerah yang semula dengan pengenaan retribusi pemakaian kekayaan daerah * Adanya tanah aset daerah yang belum didukung dengan dokumen legal formal yang sah * Proses sertifikasi atas tanah aset daerah mengalami kendala disebabkan belum tersedianya data/alas hak karena terbatasnya data pendung.bukti kepemilikan yang sah atas tanah aset daerah * Pemanfaatan Tanah Aset Daerah sesuai peruntukan dan pemanfaatannya   **b. Penyebab Internal**   * Belum sepenuhnya Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD memahami perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah * Jabatan Pengurus Barang dianggap sebagai penggugur kewajiban dan pelengkap saja dalam pelaksanaan pengelolaan BMD * Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) belum sepenuhnya pemdukung penyusunan LBMD * Belum terbangunnya SIN ( Single Identification Number)/ Data Tunggal BMD * Terbatasnya jumlah SDM pengelola BMD SKPD * Adanya tanah aset daerah yang belum didukung dengan dokumen legal formal yang sah * Proses sertifikasi atas tanah aset daerah mengalami kendala disebabkan belum tersedianya data/alas hak karena terbatasnya data pendung.bukti kepemilikan yang sah atas tanah aset daerah * Penerapan penatausahaan BMD melalui e-BMD menuntut Pengelola BMD SKPD mengembangkan kapasitas dan pengetahuannya   **c. Penyebab Eksternal**   * Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan aset daerah tidak dibarengi dengan aturan teknis petunjuk pelaksanaannya * Penerapan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaan asset daerah melalui e- BMD * Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum tersosialisasikan kepada Pengeloma BMD SKPD * Penerapan penatausahaan BMD melalui e-BMD menuntut Pengelola BMD SKPD mengembangkan kapasitas dan pengetahuannya * Penerbitan Ijin Pemakaian Tanah Aset Daerah yang dimohon sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya | |
| **Capaian Program** | **Tujuan Program yang telah Diformulasikan** | |
|  | 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan 2. Laporan BMD sebagai bagian L/K Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mendukung pencapaian opini BPK 3. Kontribusi Pemanfaatan BMD terhadap PAD 4. Peningkatan Status Hukum Tanah Aset Daerah melalui sertoifikasi 5. Ijin Pemakaian Tanah Aset Daerah sesuai peruntukan dan pemanfaatannya | |
|  | **Indikator dan Target Kinerja** | |
|  | **Output:**   * Laporan Barang Milik Daerah tersusun sesuai ketentuan mendukung opini BPK WTP * Kontribusi Prmanfaatan Barang Milik Daerah terhadap PAD 0,013%   **Outcome:**   * Kontrinbusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar * % Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan * % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukanmya | |
| **Jumlah Anggaran Kegiatan** | Rp 2.916.798.134,- | |
| **Rencana Aksi** | **Sub Kegiatan 1** | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |
| Masukan/Input | Rp. 63.393.200,- |
| Keluaran | Jumlah entitas yang mendapatkan pembinaan 131 entitas terdiri:   * Pejabat Penatausahaan BMD SKPD dalam hal ini melekat kepada Kepala Sub Umum, Sekretariat SKPD sebanyak 28 orang   P = 13 orang  L = 15 orang   * Pengurus Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dari sebanyak= 112 orang, terdiri : P = 44org, L = 68 org |
| Hasil | % Kontribusi pemanfaatan BMD terhadap PAD 0,013%  % Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap Neraca  Pemerintah Daerah  % BMD berupa tanah yang bersertifikat |
| **Sub Kegiatan 2** | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah |
| Masukan/Input | Rp. 199.948.000,- |
| Keluaran | Jumlah yang mendapatkan asistensi /pendamoingan = 131 entitas  Jumlah yang reknonsiliasi dan konsolidasi L/K SKPD = 131 entitas  terdiri:   * Pejabat Penatausahaan BMD SKPD dalam hal ini melekat kepada Kepala Sub Umum, Sekretariat SKPD sebanyak 28 orang   P = 13 orang  L = 15 orang   * Pengurus Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malangdari sebanyak= 112 orang, terdiri : P = 44org, L = 68 org |
| Hasil | * Kontrinbusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar * % Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan * % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukanmya |
| **Sub Kegiatan 3** | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| Masukan/Input | Rp. 66.460.000,- |
| Keluaran | Dokumen yang tersusun 4 Ranperwal |
| Hasil | * Kontrinbusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar * % Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan * % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukanmya |
| **Sub Kegiatan 4** | Penatausahaan Barang Milik Daerah |
| Masukan/Input | Rp 98.525.800,- |
| Keluaran | Jumlah laporan BMD tersusun = 12 |
| Hasil | * Kontrinbusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar * % Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan * % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukanmya |
| **Sub Kegiatan 5** | Pengamanan Barang Milik Daerah |
| Masukan/Input | Rp 825.426.000,- |
| Keluaran | Tanah aset daerah bersertifikat= 2000 bidang  Benda-benda berharga terpelihara baik |
| Hasil | * Kontrinbusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar * % Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan * % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukanmya |
| **Sub Kegiatan 6** | Penilaian Barang Milik Daerah |
| Masukan/Input | Rp 1.302.723.300,- |
| Keluaran | Dokumen penilaian BMD untuk disewa/dihapus |
| Hasil | * Kontrinbusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar * % Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan * % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukanmya |
| **Sub Kegiatan 7** | Optimaliasai penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD |
| Masukan/Input | Rp 93.820.000,- |
| Keluaran | Ijin Pemakaian yang terbit= 150 IP |
| Hasil | * Kontrinbusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar * % Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan * % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukanmya |
|  | **Sub Kegiatan 8** | Pengawasan dan Pengendalian Pengeloaan BMD |
| Masukan/Input | Rp 61.008.334,- |
| Keluaran | Ijin Pemakaian Tanah Aset Daerah sesuai peruntukan dan pemanfaatannya |
| Hasil | * Kontrinbusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar * % Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan * % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukanmya |
| **Sub Kegiatan 9** | Inventarisasi Barang Milik Daerah |
| Masukan/Input | Rp 205.493.500,- |
| Keluaran | Data tanah, bangunan/gedung yang terimventarisasi |
| Hasil | * Kontrinbusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar * % Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan * % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukanmya |

|  |  |
| --- | --- |
| Keterangan :  Tanggal pembahasan :  Catatan hasil pembahasan: | Malang, Agustus 2025  KEPALA BADAN KEUANGAN  DAN ASET DAERAH,  **Drs. SUBKHAN, M.A.P**  Pembina Utama Muda  NIP. 19680408 198809 1 001 |

1.

2.

3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tim Anggaran Pemerintah Daerah :** | | | | |
| **NO** | **NAMA** | **NIP** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |